

**IMPLEMENTASI PROGRAM *TWO DAYS NO RICE*
(DUA HARI TANPA MAKAN NASI) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Anastasia Gloria Lino
NPP 30.1294

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email : glrialino@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Teguh Ilham, S.STP, M.Arts

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Sangihe Islands Regency itself is a border, remote and outermost area which is so vulnerable to food problems and poverty that this area is still dependent on food supplies from outside the region. As a result of dependence on other regions and the lack of infrastructure that causes expensive distribution costs from production centers to consumption centers, for example, the need for food, especially staple food (rice), is greater than its availability. Through this program, the aim is to reduce dependence on rice from outside the region and utilize local food. **Purpose :** This study aims to determine the implementation of the Two Days No Rice Program policy which is implemented to reduce dependence on food from outside the region. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The theory used is the Theory of Policy Implementation by Van Meter and Van Horn, where data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data display and data verification. **Results :** The findings obtained by researchers in this research are the implementation of all implementers in carrying out the Two Days No Rice program as measured in the Social, Economic and Political Environment dimensions which then obtain the inhibiting factors for the running of this program as well as the efforts made by the government and society so far. **Conclusion:** Based on observations the Two Days No Rice program has been running but has not been implemented properly and effectively in accordance with the indicators from the dimensions of the Social, Economic and Political Environment. Factors constraining the program are limited human resource and budgetary support, lack of political support, minimal food production, inadequate food facilities and infrastructure, and poor program transmission. Efforts made by the Food Security Service include tiered socialization/appeals, utilizing local food on Tuesdays and Fridays, providing capital assistance to farmers and utilizing yards.

Keywords: Policy Implementation, Two Days No Rice Program, Food Security

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri merupakan daerah perbatasan, terpencil dan terluar yang begitu rawan dengan masalah pangan serta kemiskinan sehingga daerah ini masih ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Akibat ketergantungan dengan daerah lain dan kurangnya sarana prasarana yang menimbulkan mahalnya bisaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi contohnya kebutuhan pangan terlebih pangan pokok (beras) yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya. Melalui Program ini yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah dan memanfaatkan pangan lokal **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Two Days No Rice yang dijalankan untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiaik ini yaitu implementasi dari seluruh implementor dalam melaksanakan program Two Days No Rice yang diukur dalam dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang kemudian mendapatkan faktor-faktor penghambat berjalannya program ini serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sejauh ini.

Kesimpulan : Berdasarkan pengamatan program Two Days No Rice ini sudah berjalan namun belum terimplementasikan dengan baik dan efektif sesuai dengan indikator-indikator dari dimensi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Faktor yang menjadi hambatan program yaitu terbatasnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya dukungan politik, produksi pangan yang minim, sarana dan prasarana pangan tidak memadai, dan transmisi program kurang. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan meliputi sosialisasi/himbauan berjenjang, memanfaatkan pangan lokal di hari selasa dan jumat, pemberian bantuan modal kepada petani dan pemanfaatan pekarangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program *Two Days No Rice*, Ketahanan Pangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan selalu berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kebiasaan makan serta sangat dipengaruhi oleh kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dalam hubungannya dengan ketersediaan pangan, maka upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan produksi, meminimalisasi kehilangan hasil (pasca panen) dan peningkatan keamanan pangan dan nilai gizi.

Di Provinsi Sulawesi Utara, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat

dibutuhkan upaya untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara optimal. Dalam upaya memenuhi kecukupan kebutuhan pangan masyarakat terutama beras, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara antara lain melaksanakan diversifikasi serta menggalakkan program ketahanan pangan. Aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan yaitu diversifikasi pangan yang memiliki manfaat untuk peningkatan pendapatan petani. Diversifikasi produksi ini secara langsung ataupun tidak juga akan mendukung upaya penganekaragaman pangan (konsumsi) yang merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Terkhusus Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri merupakan daerah perbatasan, terpencil dan terluar yang begitu rawan dengan masalah pangan serta kemiskinan sehingga daerah ini masih ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Persoalan pangan terutama beras bukanlah persoalan baru di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi merupakan persoalan klasik saban waktu muncul dengan variasi yang beragam. Daerah ini memang sarat dengan berbagai permasalahan spesifik karena memiliki beberapa karakteristik antara lain yaitu :

1. Daerah ini merupakan daerah perbatasan yang identik dengan keterbatasan, ketertinggalan dan kumuh.
2. Daerah kepulauan identik dengan termaljinalkan aksesibilitas lemah yang terisolir dan miskin terlebih desa yang ada di pulau-pulau kecil masyarakatnya miskin dan daya beli yang murah sehingga mempengaruhi aspek pola konsumsi rentan dengan rawan pangan.
3. Daerah yang sensitive dengan rawan bencana alam seperti gelombang tinggi terjadi hampir setiap tahun, banjir, dan tanah longsor.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program tersebut disinyalir ada kecenderungan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan terdapat beberapa kesulitan yang berimplikasi kepada sebagian besar wilayah yang masih rawan pangan seperti dari aspek teknis cara makan dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang sulit diubah yang menyangkut sulit atau tidaknya proses makanan dimasak, aspek sosial (menyangkut kebiasaan dan selera), dan aspek ekonomi (berkaitan dengan tingkat pendapatan dan harga bahan makanan) (Suryana, 2014). Kekuatan politik daerah ini yaitu perbatasan NKRI paling utara adalah jati diri bangsa perlu sehat dan kuat untuk mempertahankan daerah perbatasan ini. Sebagai daerah kepulauan rentan dengan rawan pangan, aksesibilitas lemah sehingga perlu menjadi perhatian khusus serta tidak ada kesan terbiarkan, termaginalkan dan terpinggirkan dengan menekan biaya konsumsi rumah tangga, hal tersebut menyebabkan adanya instabilitas politik. Harga pangan seperti umbi-umbian relatif mahal sehingga pasokan dari luar daerah oleh pedagang sulit dihindari akibat besarnya permintaan pasar. Meningkatnya harga pangan terlebih beras hampir di semua daerah dikarenakan ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan pangan yang terjadi saat ini masih kurang karena hanya didatangkan dari luar daerah seperti beras 100% (persen) dari luar daerah. Akibat ketergantungan dengan daerah lain dan kurangnya sarana prasarana yang menimbulkan mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi contohnya kebutuhan pangan terlebih pangan pokok (beras) yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah kajian “Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi” (Dine Meigaw&Melawati 2017) adanya Peraturan tersebut diharapkan terjadinya penganekaragaman konsumsi pangan dengan menyediakan pasokan pangan lokal diluar beras ataupun terigu dalam setiap kegiatan yang diadakan baik itu rapat kerja atau pertemuan yang sehari-hari dilakukan dan skripsi oleh (Husen Rahim 2021) dengan judul “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat”, Dalam penelitiannya ada 4 komponen utama dalam implementasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai yaitu intensifikasi kebijakan, ekstensifikasi kebijakan, diversifikasi kebijakan, dan faktor ketahanan serta keraawanan pangan seperti peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, dan faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian masyarakat seperti musim dan cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, kajian dari jurnal Administari Publlik (Adi Sutoyo 2013) “Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Provinsi Bengkulu” dengan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah langkah kebijakan yang tepat bertujuan untuk terwujudnya kebiasaan makan yang baru dengan membiasakan rakyat mengkonsumsi makanan sehari-hari yang dengan berbagai macam pangan sehingga ketergantungan pada salah satu komoditas pangan dalam hal ini beras dapat direduksi. Adapun kajian jurnal berjudul “Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan” (Mewa Ariani Tahun 2010), bahwasannya Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor mengalami peningkatan diakui menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menjadi baik. Selanjutnya, kajian skripsi Berjudul “Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya Di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur” (Kurniawati Anggun 2013) bahwasannya implementasi kebijakan di Kecamatan Kambera lewat program mengkonsumsi pangan lokal yaitu Satu Hari Tanpa Beras setiap hari kami baik di dalam rumah tangga ataupun lingkup pemerintahan, namun belum diimplementasikan dengan baik karena kekurangan penyampaian informasi, anggaran rendah, tidak berjalannya penyuluhan karena diketahui kegiatan ini dilakukan satu kali satu tahun.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakuka oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada implementasinya yang menunjukkan mengenai ukuran dan penjelasan pencapaian program bukan untuk mengukur hasil akhir dari kebijakan yang telah dibuat, itu karena kebanyakn implementasi setiap kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik namun gagal memberikan dampak yang baik pula. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengambil teori implementasi kebijakan oleh Teori Van Meter dan Van Horn yang diukur dengan 6 (enam) dimensi yaitu ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan mendapatkan informasi tentang implementasi Kebijakan ketahanan pangan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kab.Kep.Sangihe dalam kebijakan Peraturan Bupati No.33 Tahun 2017 tentang Program Two Days No Rice di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memperoleh gambaran apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Program Two Days No Rice di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan memperoleh gambaran apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Two Days No Rice di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan konsep teori yang sudah dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013) bahwa metode penelitian kualitatif yang bertolak ukur pada filsafat postpositiveme, digunakan untuk meneliti keadaan obyek yang bersifat alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran masalah yang akan diteliti, pendalaman karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara terhadap 13 orang informan yang terdiri dari 5 orang dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Adapun 2 orang camat, 1 anggota DPRD, 2 orang Pedagang dan 1 orang Tokoh Pangan dan 1 orang Petani. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan perspektif teoritis yaitu teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn karena teori ini menggambarkan situasi dan kondisi di dalam implementasi kebijakan dari program ini. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang didalamnya terdapat 6 dimensi, dimana salah satu dimensinya yaitu Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dihipotesiskan bahwa ekonomi, sosial dan politik dari organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter pelaksana, disposisi pelaksana dan kinerja dengan 6 indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi, yaitu Keberhasilan dukungan sumber daya, Pengaruh implementasi kebijakan terhadap kondisi ekonomi dan sosial, Sifat opini publik, Dukungan elit politik, Dukungan partisan/organisasi terhadap kebijakan dan Pengaruh kelompok kepentingan swasta. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Tabel 1. Indikator Hasil dan Pembahasan

IMPLEMENTASI PROGRAM TWO DAYS NO RICE (Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik)	
Indikator	Hasil dan Pembahasan
Keberhasilan Dukungan Sumber Daya	Berkenan dengan implementasi program Two Days No Rice Sumber Daya Alam dalam program ini menunjang penerapan program tersebut karena pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe memuat program in yaitu terdiri dari pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian dan sebagainya. Adapun dengan Sumber Daya Manusia (pelaksana) dalam program ini sangatlah penting, yang mana sumber daya manusia selaku pelaksana merupakan penentu keberhasilan objek atau sasaran atas implementasi program Two Days No Rice yaitu masyarakat. Sumber Daya Anggaran pun sangat penting, karena melalui sumber daya anggaran segala sumber daya alam yang diolah oleh sumber daya manusia dapat terfasilitasi. Apabila sumber daya yang tersedia masih kurang memadai, akan sangat berpengaruh pada kebijakan program sehingga tidak dapat terimplementasikan dengan baik.
Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan penelitian peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sangat dirasakan dikalangan petani dan pedagang pangan lokal(umbi-umbian) dimana pada saat terjadi penurunan produksi dan permintaan akan pangan lokal karena kurang minatnya masyarakat akan pangan lokal dan program Two Days No Rice yang dijalankan oleh pemerintah sudah tidak begitu aktif seperti pada awal dibuatnya program ini. • Berdasarkan Penelitian jelas bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat bergantung pada pasokan pangan yang didatangkan dari luar daerah dengan beberapa fakta yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yaitu : Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan daerah penghasil/produksi beras karena

	<p>keterbatasan luas lahan garapan dan kebanyakan petani memproduksi pangan hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saja, Pasokan pangan (beras) dari luar daerah lebih murah dijual di pasar dibandingkan dengan pangan lokal, Akses ketersediaan pangan di perkotaan (Tahuna) yang jauh dari sumber daya produksi pangan lokal, Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelompok tani produksi pangan lokal, sehingga etos kerja petani kurang dalam memenuhi ketersediaan pangan apalagi di daerah-daerah yang rawan pangan.</p>
Sifat Opini Publik	<p>Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan sifat opini publik yang baik dengan adanya program Two Days No Rice ini maka perlu didasari dengan pemahaman oleh para implementor atau pelaksana yaitu pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk melihat seberapa besar keberhasilan/kepuasan mengenai program ini berdasarkan pandangan atau pemahaman masyarakat</p>
Dukungan Elit Politik	<p>Berdasarkan penelitian program ini tidak berjalan baik karena anggota DPR tidak tahu-menahu soal adanya Kebijakan Peraturan Bupati tentang Program Two Days No Rice. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan dengan semestinya, seharusnya setiap kebijakan apapun terlebih adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 yang dikeluarkan harus dibahas dengan DPR sehingga tidak terkesan berjalan sendiri tanpa adanya lembaga DPR yang mendukung. Penyebabnya program ini dinilai tidak jelas karena tidak pernah disampaikan dari eksekutif ke legislatif dengan adanya kebijakan program.</p>
Dukungan Partisan/Organisasi terhadap kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi yang dilakukan mendukung hasil wawancara di atas bahwa program ini telah dijalankan namun terlihat dari sikap pemerintah belum berhasil karena kurangnya perhatian langsung dalam memberikan fasilitas terlebih kepada masyarakat petani sehingga program ini dinilai tidak efektif. • Program Two Days No Rice telah disosialisasikan kepada seluruh camat, lurah dan

	kelompok-kelompok organisasi dalam kecamatan untuk memberikan informasi tentang Program Two Days No Rice dengan segala himbauan dan ajakan yang dibutuhkan dalam rangka terlaksananya dengan baik pelayanan dari Pemerintah dalam hal ini lewat Dinas Ketahanan Pangan.
Pengaruh Kelompok Kepentingan Swasta	Dari penelitian tersebut bahwa adanya program Two Days No Rice tidak menjadi pengaruh kerugian dari pedagang sembako yang menjual beras karena masyarakat pun tetap membeli beras seperti sebelum ada program. Begitupun bagi penjual umbi-umbian, permintaan akan umbi-umbian meningkat sehingga terjadinya perputaran ekonomi bagi penjual umbi-umbian yang semula minim keuntungan namun sesudah adanya program keuntungan meningkat akan tetapi permasalahannya ialah umbi-umbian sebagian besar bukan dari dalam daerah melainkan masih saja merupakan pasokan dari luar daerah (Manado). Hal ini menjawab bagaimana pengaruh swasta dari adanya program ini, berkat adanya program ini terjadi perputaran ekonomi baik bagi penjual sembako yang menjual beras dan penjual umbi-umbian.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Pada **Tabel 1** memuat hasil yang telah dilakukan peneliti dalam meneliti setiap indikator yang telah disusun sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasinya program ini belum berjalan dengan baik dengan adanya beberapa hambatan yang ditemui di tiap-tiap indikatornya sehingga bisa dibilang program ini tidak terimplementasikan sesuai dengan harapan yang ada dalam peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017.

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Two Days No Rice di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Implementasi suatu program tidak akan lepas dari adanya hambatan yang menjadi pengganggu jalannya suatu proses kebijakan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dari implementasi program tersebut. Sudah dipaparkan sebelumnya, secara umum penerapan Program Two Days No Rice masih terjadi kendala

Tabel 2 Faktor Penghambat/Kendala dan Solusi Yang Dapat Dilaksanakan

No	Kendala Yang Dihadapi	Solusi Yang Dapat Dilaksanakan
1.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Membuka lahan garapan yang dapat

	bukan daerah penghasil/produksi karena luas lahan garapan petani relatif kecil, sehingga petani memproduksi pangan hanya untuk kebutuhan konsumsi keluarga	memproduksi pangan lokal. Lahan garapan baik dari kelompok tani yang membudidayakan maupun tanah pemerintah yang dijalankan oleh kelompok tani
2.	Kebutuhan konsumsi pangan lokal di ibukota kabupaten cukup besar sedangkan produksi dari dalam daerah sedikit sehingga harus tetap dipasok dari luar daerah agar perputaran ekonomi tetap berjalan.	Membuka lahan garapan yang selanjutnya akan memuat banyak produksi begitupun harus diimbangi dengan sumber daya manusia dalam memproduksi serta bantuan berupa pupuk yang akan membantu dalam produksi
3.	Akses ketersediaan di perkotaan jauh dari sumber daya penghasil makanan lokal (umbi-umbian) sehingga harga pangan lokal (umbi-umbian) jauh lebih mahal dibandingkan beras.	Seharusnya di kotapun bisa memproduksi pangan lokal di pekarangan warga agar memudahkan menghasilkan pangan lokal tidak hanya beras.
4.	Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mensosialisasikan kembali dan memfasilitasi petani maupun pedagang pangan lokal	Pemerintah harus ikut membantu dengan memberikan bantuan modal adapaun harus bekerjasama dengan kelompok tani dalam menggerakkan para petani sehingga program ini boleh berjalan dengan baik dengananya pangan lokal dan tidak bergantung dengan beras dari luar daerah.
5.	Tidak ada dukungan dari Legislatif akan adanya pendanaan kebijakan program karena selama ini tidak dibahas masalah program ini di DPR, artinya tidak terjalin komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif daerah mengenai kebijakan program ini.	Hubungan antara legislatif dan eksekutif harus berkoordinasi dengan baik mengenai kebijakan program ini. Karena tanpa adanya dukungan dari legislatif pun, program ini sulit untuk ditindaklanjuti terlebih dalam bantuan pendanaan/penganggaran.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023\

Dapat dilihat pada **Tabel 2** diatas terkait dengan kendala/faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Program Two Days No Rice berupa produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, luas lahan garapan petani pangan lokal reative kecil, harga pangan lokal di pasar mahal, lemahnya koordinasi dan dukungan legislatif.

3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Dalam Keberhasilan Pelaksanaan Program Two Days No Rice

Untuk membangun sistem ketahanan pangan perlu adanya upaya terlebih dalam mengatasi berbagai macam hambatan agar program ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan efisien seperti dibutuhkan tahapan produksi dan pengolahan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan distribusi kepada konsumen terkait dengan program Two Days No Rice. Dengan demikian ke depan tidak hanya mengelola masalah pangan saja yang diperlukan, tetapi juga termasuk menangani masalah gizi yang berjalan sinergi dengan pengelolaan pangan. Untuk itu dibutuhkan upaya ketahanan pangan yang relevan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan masyarakat yang meliputi :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
4. Peningkatan status gizi masyarakat, serta
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan Implementasi Program Two Days No Rice dalam penanggulangan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, yaitu :

1. Dinas ketahanan Pangan telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana serta bantuan dalam bentuk Beras yang diberikan guna sebagai Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat yang diberikan kepada tiap-tiap kecamatan yang digunakan sebagai cadangan pangan jika suatu waktu terjadi bencana alam yang menghambat pasokan dari luar daerah. Cadangan Pangan ini merupakan bantuan khusus bagi daerah rawan pangan karena dipengaruhi oleh akses ketersediaan yang sulit.
2. Sosialisasi dan himbauan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk banner/spanduk terkait Program Two Days No Rice serta memberikan edukasi dan sosialisasi dalam pertemuan dengan kelompok tani.
3. Upaya selanjutnya yang sudah dilakukan adalah menindaklanjuti amanat Perbup No.33 Tahun 2017, yaitu memanfaatkan dan mengonsumsi pangan lokal disetiap acara/pertemuan khusus di hari Selasa dan Jumat. Walaupun secara garis besar, dilaksanakan hanya dalam ranah pemerintahan seperti acara Ulangtahun Daerah (Tulude), pertemuan, rapat, dan acara lainnya yang mengundang aparat Pemerintah di hari Selasa dan Jumat.
4. Program pemanfaatan program pekarangan yang akan menunjang Program Two Days No Rice. Melalui Program Me'daseng setiap minggu secara bergilir di setiap kecamatan, maka dinas ketahanan pangan pun pernah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah guna memperkenalkan sekaligus mempraktikkan program Two Days No Rice.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program Two Days No Rice adalah Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi sebagai suatu gerakan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan

sebagai implementasi Diversifikasi Pangan untuk menunjang Ketahanan Pangan di daerah. Gerakan Dua Hari Tanpa Makan Nasi “*Two Days No Rice*” menjadi acuan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam 1 (satu) minggu ditetapkan dua hari yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat untuk tidak mengkonsumsi nasi serta bahan pangan olahan yang mengandung beras dan tepung terigu, digantikan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat yaitu sagu, ubi kayu, ubi jalar, pisang, jagung, talas atau umbi-umbian lainnya. Dalam melaksanakan Program Two Days No Rice ini perlu mendapat dukungan, peran serta dan sinergi dari instansi vertikal dan pemangku kepentingan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga adat dan agama, BUMN/BUMD, pelaku usaha perhotelan serta melibatkan perak aktif dari Tim Penggerak PKK mudal dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai di Tingkat Kampung/Kelurahan dan juga melibatkan orak aktif samdari Dharma Wanita dan Organisasi lainnya. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan merupakan penanggungjawab dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Program Two Days No Rice ini Sesuai dengan tujuan dibentuknya Program Two Days No Rice ini yaitu :

1. Mengurangi pasokan pangan (beras) dari luar daerah dengan menerapkan makanan lokal sebagai diversifikasi pangan
2. Memutar roda perekonomian pelaku/implementor baik itu pemerintah, masyarakat, petani ataupun pengusaha

Berdasarkan tujuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Program Two Days No Rice ini perlu diterapkan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan professional karena memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan pemerintah saja melainkan seluruh komponen masyarakat karena berbicara tentang pangan menyangkut seluruh makhluk hidup. Peneliti menemukan temuan penting yakni Program Two Days No Rice ini sangat penting untuk diimplementasikan karena bagian dari perwujudan program pemerintah yang baik. Sama halnya dengan temuan Husein Rahim 2021 menemukan bahwa ada beberapa kebijakan yang diperlukan dalam operasional dilaksanakannya upaya mewujudkan ketersediaan pangan nasional yaitu dengan adanya strategi dan kebijakan diversifikasi pangan yang bertujuan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat agar memberi diri dan atas kemampuannya sendiri melaksanakan diversifikasi pangan dan menambah pengetahuan, meminimalisir mengkonsumsi beras dan pangan impor dengan cara meningkatkan konsumsi pangan lokal. Begitupun dengan temuan Dine Meigaw dan Melawati, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan adanya surat edaran Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dimana dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan terjadinya penganekaragaman konsumsi pangan dengan menyediakan pasokan pangan lokal diluar beras ataupun terigu dalam setiap kegiatan yang diadakan baik itu rapat kerja atau pertemuan yang sehari-hari dilakukan, lalu adanya himbuan untuk tidak mengkonsumsi nasi dalam satu hari yaitu ditentukan pelaksanaannya pada hari kamis dengan nama program yaitu “*Two Days No Rice*” dan turut serta menghimbau dengan melakukan sosialisasi untuk peningkatan daya saing sebagai konsumsi wajib daerah agar peningkatan pangan lokal berhasil. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan perkembangan bahwa kebijakan itu sudah berjalan dengan efektif. Sasaran utama dari kebijakan ini ialah partisipasi

masyarakat namun partisipasi masyarakat itu sendiri belum bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, mengenai sumberdaya lokal yang tidak mendukung karena kondisi tertentu seperti semakin berkurangnya lahan sawah sehingga pendistribusian ketersediaan pangan lokal masih bergantung dari tempat lain (Dine Meigaw dan Melawati, 2017). Program ini sebelumnya sudah dibuat oleh pemerintah Kota Depok (Azwar, 2013) sejak tahun 2011 yaitu Program *One Day No Rice* dimana sama halnya dengan program yang dijalankan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menekankan pada Diversifikasi pangan. Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai program ini dapat dilihat dari empat tepat (tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, dan tepat lingkungan). Sehingga Kota Depok mengalami kekurangan persediaan beras sebanyak 487 ton perharinya. Kebijakan ini dapat dibidang banyak menuai pujian dikarenakan dampaknya yang mampu mengurangi tingkat konsumsi beras masyarakat dan juga meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat. Dari hasil review jurnal yang ada, didapatkan gambaran bahwa Implementasi Program Two Days No Rice Ada beberapa pertimbangan dilakukannya kebijakan tersebut antara lain: Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal termasuk menggalakkan diversifikasi pangan lokal, Meningkatkan pendapatan masyarakat, Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat dari implementasi program ini yaitu produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, luas lahan garapan petani pangan lokal kecil, harga pangan lokal di pasar mahal dibandingkan dengan beras, lemahnya koordinasi dan etos kerja sumber daya manusia dan tidak ada dukungan legislatif.

IV KESIMPULAN (5-10%)

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Two Days No Rice telah dilaksanakan namun belum terimplementasikan dengan diukur dengan 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi, yaitu Keberhasilan dukungan sumber daya, Pengaruh implementasi kebijakan terhadap kondisi ekonomi dan sosial, Sifat opini publik, Dukungan elit politik, Dukungan partisan/organisasi terhadap kebijakan dan Pengaruh kelompok kepentingan swasta dimana peneliti mengidentifikasi tiap indikator masih terdapat berbagai hambatan atau kendala sehingga belum maksimal seperti indikator Dukungan Elit Politik ditemukan kurangnya koordinasi antar eksekutif dan legislatif serta kebijakan yang tidak jelas dan tidak dibahas di DPRD sehingga segala bantuan penganggaran tidak disalurkan kepada Dinas Ketahanan Pangan sebagai implementor program ini. Adapun indikator keberhasilan Dukungan Sumber Daya yang dinilai rendahnya etos kerja petani dan aparat pemerintah sebagai Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran yang diolah oleh aparat pemerintah seperti sarana dan prasarana petani yang tidak memadai sehingga program ini dikatakan belum berhasil atau belum terimplementasikan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dalam proses dokumentasi tidak mendapatkan semua apa yang tertera di tiap indikator misalnya proses transmisi program.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih adanya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Two Days No Rice di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Cv.Alfabeta.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Dr. H.Tachjan, M. S. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (ed.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Dr.H.Tachjan, M. S. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.
- Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kaman, N. (2010). *Pedoman Umum Gerakan Makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman* (2010th ed.).
- Kodoati Raymond. (2022). *Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2022: Vol. Catalog*: (S. Mokodompis & R. Salendah (eds.)). BPSKabupaten Kepulauan Sangihe. <https://doi.org/2654-6833>
- Nazir. (2013). *Metode Penelitian* (G. Indonesia (ed.); Indonesia,). Ghalia Indonesia.
- Purwanto. (2013). *Dokumen Pendukung Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP)*.
- Rahim, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat*. 1–115.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cv.Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno B. (2007). *Kebijakan Publik*. Pt Buku Kita.
- Anggun, K. (2013). Implementasi Kebijakan Diversifikasi Pangan Melalui Gerbang Hilu Liwanya Di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. *Skripsi*.
- Astuti, T., & Christine, D. (2017). Pre-Evaluasi Gerakan One Day No Rice (Odnr) Ditinjau Dari Keanekaragaman Konsumsi Pangan Pegawai Di Kantor Pemerintah Kota Depok. *Gizi Indonesia*, 39(2), 125. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v39i2.215>
- Azwar, S. M. (2013). *One Day No Rice Dilihat Dari Perilaku Karyawan Pemda Depok Sebagai Konsumen*. Vol. 10 No, 28–37.

- Melawati, D. M. &. (2017). Implementasi kebijakan himbauan panganekaragaman konsumsi pangan di bidang ketahanan pangan kota sukabumi. *Artikel*, 7 No. 1.
- Rahim, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat*. 1–115.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>
- Syafiullah, Y. (2016). Kebijakan Pangan Di Indonesia: Antara Swasembada Pangan dan Kecukupan Pangan. In *Jurnal Bestari*.

